

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

##### A.1. Pengertian Putusan Hakim

Secara etimologi putusan hakim berasal berasal dua suku istilah yakni “Putusan” serta “hakim”. Putusan dari Kamus akbar Bahasa Indonesia asal dari istilah “Putus” yang ialah: (1) tak bekerjasama (bersambung) lagi sebab terpotong dan sebagainya, (2) habis, (3) selesai, rampung, berakhir, (4) ada kepastian (ketentuan, ketetapan, penyelesaian), mendapatkan kepastian.<sup>1</sup>

Sedangkan kata Hakim itu sendiri dalam Bahasa Inggris berasal asal istilah “Judge” sedangkan dalam Bahasa Belanda asal dari istilah “rechter” yg merupakan pejabat yg memimpin persidangan. Sedangkan dalam Bahasa Arab dari asal kata “hakima” yang berarti hukum, peraturan, kekuasaan, pemerintah.<sup>2</sup> dalam Kamus besar Bahasa Indonesia hakim diartikan menjadi (1) orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), (dua) pengadilan, (3) juri, penilai (dalam perlombaan serta sebagainya), berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.<sup>3</sup>

Putusan hakim jua lazimnya dianggap menggunakan putusan pengadilan.

Putusan pengadilan pernyataan hakim yg diucapkan pada sidang pengadilan

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Putus*, dalam <https://kbbi.web.id/putus.html>, yang diakses pada 15 November 2019

<sup>2</sup>Ensiklopedia, wikipedia Bahasa Indonesia, *hakim* dalam <https://wikipedia.org/hakim.html>, yang diakses pada 15 November 2019

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hakim*, dalam <https://kbbi.web.id/hakim.html>, yang diakses pada 15 November 2019

terbuka yg dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 nomor 11 KUHAP. sementara Maruarar Siahaan yg mengutip pandanganya Mr. M.P Stein menyatakan putusan peradilan merupakan perbuatan hakim menjadi pejabat negara berwenang yang diucapkan pada sidang terbuka buat awam serta dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yg dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>4</sup>

Ada jua yang menyatakan bahwa hakim adalah wakil tuhan di bumi buat menegakan aturan serta keadilan.<sup>5</sup> Menurut Bambang Waluyo, Hakim ialah organ pengadilan yg diklaim memahami hukum, yg dipundaknya sudah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar aturan serta keadilan ditegakan baik sesuai hukum tertulis mapun tidak tertulis.<sup>6</sup>

Hakim merupakan pejabat negara baik sebagai hakim karir maupun sebagai hakim non karir, yang diberikan tugas untuk melakukan kekuasaan. Hakim yang dimaksud adalah hakim di Mahkamah Agung yang selanjutnya MA serta hakim pada badan peradilan yg berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata perjuangan negara, dan hakim pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tadi.<sup>7</sup> dari aneka macam institusi peradilan yang secara langsung dibawah sang Mahkamah Agung dan Mahkamah

---

<sup>4</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Putusan Hakim Harus Di Umumkan*, yang dirilis dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan>, yang diakses pada 15 November 2019

<sup>5</sup> Al Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)* Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Hal. 2

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Cetakan Ke 1, Jakarta. Hal. 12

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konstitusi setiap hakim pada lingkungan peradilan padaawasi sang pengawas Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial pada bagian eksternal.

Kehakiman yang Suatu putusan hakim diambil sesuai akibat sidang permusyawaratan hakim yg bersifat rahasia,<sup>8</sup> yang di dalam pengambilan putusan tadi, masing-masing hakim mempunyai hak yang sama pada mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, konklusi yang didalamnya memuat alasan serta dasar aturan yang menjadi dasar atau sumber hukum pada memutus yang diatur dengan Undang-Undang.

## **A.2. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Sesuai amar putusan, maka dapat ditemukan jenis-jenis putusan pengadilan atau putusan hakim pada program pidana yakni putusan pengadilan berupa pemidanaan, putusan pengadilan yang berupa pembebasan berasal segala dakwaan (*vrijspraak*), dan putusan pengadilan yg berupa lepas berasal segala tuntutan aturan (*ontslag van rechts vervolging*).

(1). Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan putusan yg dikeluarkan berdasarkan investigasi pada persidangan pengadilan, pada hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yg pada dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana,<sup>9</sup> sebagaimana yg dipengaruhi dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP. Ketentuan tersebut secara tegas menggambarkan menjadi berikut

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>9</sup> HMA. Kuffal, 2008, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM Press, Cetakan Ke 10, Malang. Hal. 351-352

“Bila pengadilan beropini bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yg pada dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.<sup>10</sup>

(2). Putusan pengadilan yang berupa pembebasan berasal segala dakwaan (*vrijspraak*) adalah putusan yang dimuntahkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, yg dimana Majelis Hakim beropini bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yg telah di dakwakan kepadanya,<sup>11</sup> maka pengadilan membebaskan asal segala dakwaan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Ketentuan tadi menyatakan menjadi berikut “Jika pengadilan berpendapat lain bahwa berasal akibat investigasi di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara legal serta meyakinkan, maka terdakwa harus diputus bebas”.<sup>12</sup>

(3). Putusan pengadilan yang berupa tanggal asal segala tuntutan aturan (*ontslag van rechts vervolging*) artinya putusan yang dimuntahkan sesuai investigasi di persidangan pengadilan, yang dimana Majelis Hakim beropini bahwa terdakwa terbukti secara syah serta meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yg telah di dakwakan kepadanya,<sup>13</sup> akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan putusan tanggal dari segala tuntutan pidana sebagaimana yg ditentukan dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP. Ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut “Jika pengadilan

---

<sup>10</sup> Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup> Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>12</sup> Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>13</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, *Modul Eksekusi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta. Hal. 13

beropini bahwa kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak ialah suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus tanggal dari segala tuntutan hukum”.<sup>14</sup>

### A.3. Isi Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan selain wajib memuat alasan serta dasar putusan, jua memuat pasal eksklusif berasal peraturan perundang-undangan yg bersangkutan atau sumber hokum tidak tertulis yang dijadikan dasar buat mengadili.<sup>15</sup> Lain dari di itu suatu putusan memiliki isi yg terstruktur secara sistematis yg harus ada pada setiap putusan. Adapun struktur putusan pengadilan tingkat pertama masalah pidana mencakup:<sup>16</sup>

1. Kepala Putusan. Setiap putusan harus memiliki kepala atau bagian atas putusan yg berbunyi “menggunakan keadilan, sesuai ilahi yg maha esa. ketua putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial, karena Bila tidak dicantumkan maksud putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan bahkan bisa menyebabkannya kebatalan”.
2. Identitas Terdakwa. pada hal ini mencakup nama lengkap, tempat lepas lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, kepercayaan dan pekerjaan terdakwa.
3. Riwayat Penahanan (jika ditahan). Riwayat penahanan Tersangka/Terdakwa mulai dari tingkat penyidikan di tingkat kepolisian, pemeriksaan ditingkat kejaksaan, dan selama

---

<sup>14</sup>Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>15</sup>Lihat Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>16</sup>Riski Perdana Raya, *cara mudah memahami seluk beluk putusan pengadilan*, dirilis dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt590cca91d8a94/cara-mudah-memahami-seluk-beluk-putusan-pengadilan>, diakses pada 25 Novemer 2019

berlangsungnya pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Termasuk Perpanjangan masa penahanan.

4. Penasehat Hukum. Penasehat hukum yang mendampingi Terdakwa atau Tersangka sejak dari tingkat penyidikan di tingkat kepolisian, pemeriksaan ditingkat kejaksaan, dan selama berlangsungnya pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Termasuk Perpanjangan masa penahanan.
5. Amar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berisi uraian tentang kronologi dugaan tindak pidana, peristiwa hukumnya yang meliputi *tempus dan locus delicti*, termasuk unsur-unsur pasal yang dikaitkan dengan perbuatan, serta permohonan dakwaan untuk menetapkan bahwa perbuatannya memenuhi sebagai tindak pidana dan dihukum sesuai rumusan pasalnya.
6. Amar pembelaan terdakwa atau penasihat hukum Berisi wacana sanggahan atau keberatan atas tuntutan, yang dimana dakwaan atau tuntutan tak memenuhi unsur delik atau tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana yg di dakwakan.
7. kabar Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa. Berisi perihal kabar-informasi dari saksi-saksi baik yg memberatkan dakwaan maupun yang meringankan wacana apa yang pada dengar, ditinjau, dirasakan sang saksi. informasi pakar berdasarkan disiplin keilmuannya terkait menggunakan kasus tadi. serta terakhir fakta Terdakwa yg berisi pembenaran atau tak atas dakwaan serta lain sebagainya.

8. Pertimbangan Majelis Hakim. Pertimbangan dalam putusan bisa pula artinya pertimbangan hakim tentang masalah dan pertimbangan wacana aturan.
9. Amar Putusan. Berisi wacana jawaban atas apa yang dimohonkan sang Jaksa Penuntut umum juga Penasehat aturan Terdakwa baik mengambulkan atau menolak.
10. Nama Majelis Hakim, tanggal Putusan, Nama Panitera. Berisi perihal nama majelis hakim serta panitera pengganti yang menilik serta memutus masalah, dan termasuk lepas dibacaknya putusan hakim.

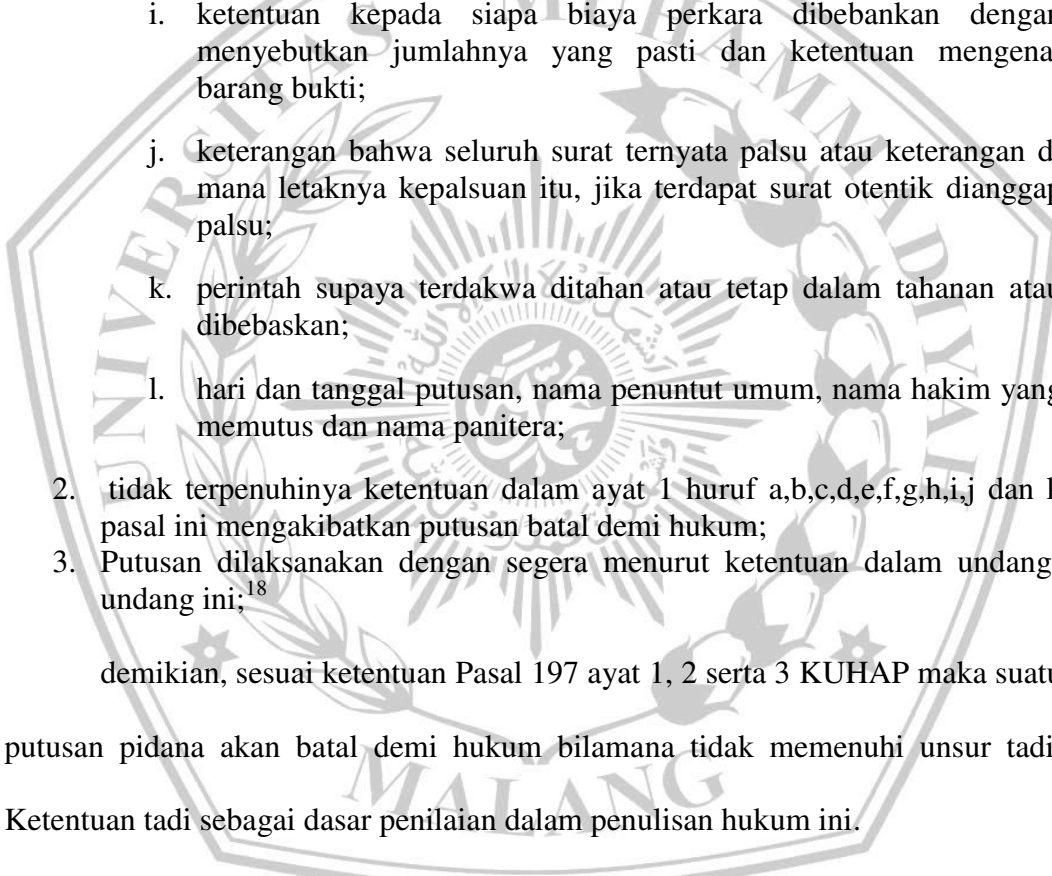
Keseluruhan unsur tersebut merupakan isi yang bersifat kumulatif, tidak terpisah melainkan harus ada semua dalam setiap produk putusan pengadilan. Selain dari unsur-unsur struktur tersebut, putusan hakim juga memiliki syarat agar ia berkekuatan hukum. Syarat menjadi berkekuatan hukumnya suatu putusan harus ditanda-tangani oleh Majelis Hakim yang memutus dan termasuk Panitera yang ikut serta dalam sidang.<sup>17</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur atau memuat syarat batalnya suatu putusan pemidanaan yang secara tersirat dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

---

<sup>17</sup>Lihat Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. Hari dan tanggal diadaknya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
2. tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j dan k pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
  3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini;<sup>18</sup>

demikian, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat 1, 2 serta 3 KUHAP maka suatu putusan pidana akan batal demi hukum bilamana tidak memenuhi unsur tadi. Ketentuan tadi sebagai dasar penilaian dalam penulisan hukum ini.

#### **A.4. Tahap-Tahap dalam Pembuatan Putusan Hakim**

Pada intinya belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait tahap-termin pada pembuatan suatu putusan oleh Majelis Hakim. Melainkan hanya mengatur perihal bagaimana alur proses peradilan pidana yakni

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Sinarindo Utama. Hal. 270.



mulai berasal pelimpahan kasus bersama Surat Dakwaan dari Penuntut umum, koordinator PN mengarah Majelis Hakim memeriksa masalah serta memutuskan hari sidang, pemanggilan Terdakwa, pembacaan dakwaan,<sup>19</sup> eksepsi (Jika terdapat) asal pencehat aturan terdakwa, replik (Jika ada) dari PU, pembuktian, penuntutan dari PU, pembelaan (pleedoi) asal pencehat hukum terdakwa, dan pembacaan putusan.<sup>20</sup>

Disamping itu Nurlen Afriza, sekiranya dapat menjadi sebuah pandangan terkait tahap-tahap dalam pembuatan putusan yakni terbagi dalam tiga tahap yang meliputi “tahap *konstatir*, tahap *kualisifir*, dan tahap *konstitutir*”.

(1). pertama tahap konstatir, yakni mengkonstatir insiden aturan yg diajukan oleh para pihak kepadanya (kepada hakim yg menilik) dengan melihat, mengakui atau membenarkan sudah terjadinya insiden yg sudah diajukan tersebut.<sup>21</sup>

Yang dimaksud mengkonstatir adalah bahwa hakim melihat, mengetahui, membenarkan, sudah terjadinya peristiwa, wajib absolut bukan dugaan, yang berdasarkan indera bukti pembuktian. verifikasi dimulai meletakkan beban bukti yg sempurna, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tadi memenuhi kondisi formil, kondisi materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. memilih terbukti atau

---

<sup>19</sup> HMA. Kuffal, *op.cit.* Hal. 323

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2013, *Kemahiran dan Keterampilan Hukum Pidana*, Penerbit Bayumedia Publisihing, Cetakan Ke enam, Malang. Hal. 144-149

<sup>21</sup> Nurlen Afriza, *tahap-tahap dalam membuat putusan*, dirilis dalam <https://www.papadang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>, diakses pada 25 November 2019.

tidak dalil insiden aturan yg diajukan. Bagi hakim yg penting merupakan berita peristiwa, bukan hukunya. sebab verifikasi adalah ruh bagi putusan hakim.<sup>22</sup>

(2). kedua kualifisir, yakni mengkualifisir peristiwa aturan yg diajukan pihak-pihak kepadanya. peristiwa yang sudah dikonstatirnya itu menjadi insiden yg sah-h benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap sah-sah terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan aturan apa, menggunakan kata lain harus ditemukan korelasi hukumnya bagi insiden yg sudah dikonstatir itu.

Pada hal ini yang dimaksud dan mengkualifisir merupakan mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil atau insiden yg telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil atau insiden yang telah terbukti serta yang tidak terbukti menggunakan dikaitkan menggunakan peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan materil atau menggunakan istilah lain hakim mencari penerapan hukum yang sempurna terhadap dalil atau peristiwa yg sudah dikonstatir.<sup>23</sup> Dan (3) Tahap ketiga *konstituir* yakni menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>24</sup>

Apabila melihat tahapan-tahapan tadi, Bila hakim mampu menerapkan tahapan tersebut menggunakan baik, tentu akan membentuk suatu putusan yg baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi para pihak yg

---

<sup>22</sup> Nurlen Afriza, *tahap-tahap dalam membuat putusan*, dirilis dalam <https://www.papadang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>, diakses pada 25 November 2019.

<sup>23</sup> Nurlen Afriza, *tahap-tahap dalam membuat putusan*, dirilis dalam <https://www.papadang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>, yang diakses pada 25 November 2019.

<sup>24</sup> Nurlen Afriza, *tahap-tahap dalam membuat putusan*, dirilis dalam <https://www.papadang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>, yang diakses pada 25 November 2019.

berperkara. Ketiga tahapan tadi harus benar-sahih dilalui sang hakim buat membuat putusan untuk dijadikan sebagai alat ukur buat menilai pertimbangan hukum hakim suatu putusan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tujuan Hukum**

### **B.1. Tujuan Hukum**

Tujuan aturan ialah arah atau target yg hendak diwujudkan menggunakan menggunakan hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tadi menggunakan mengatur tatanan serta perilaku rakyat. Begitu pula teori perihal tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang bisa pada golongan menjadi grand theory tentang tujuan aturan, sebagaimana dikemukakan Achmad Ali dalam bukunya.

Achmad Ali membagi grand theory perihal tujuan aturan ke pada beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum islam yakni menjadi berikut:

#### **a. Teori Barat.**

Menempatkan teori tujuan hukumnya yg meliputi kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan.

#### **b. Teori Timur.**

Berbeda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih memakai kultur aturan asli mereka, yg hanya menekankan maka teori perihal tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan artinya keharmonisan, serta keharmonisan ialah kedamaian”.

#### **c. Teori aturan islam.**

Teori tujuan aturan islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” pada semua umat insan, yg meliputi “kemanfaatan” dalam kehidupan global maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemafaatan ini sinkron menggunakan prinsip awam Al-Qur’an: a. Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man’u (segala yg berguna dibolehkan, serta segala yg mudarat dilarang). b. La darara wa la dirar (jangan menyebabkan kemudaratan dan jangan sebagai korban kemudaratan). c. Ad-darar yuzal (bahaya wajib dihilangkan).<sup>25</sup>

Perilah “teori barat” lebih jelasnya ia (Achmad Ali memasukan dan menjelaskanya ke dalam apa yang disebut dengan *Grand Western Theory tentang Tujuan Hukum*.<sup>26</sup> Grand Theory meliputi (1). Teori Klasik yang di dalamnya meliputi tiga teori dasar tujuan hukum yakni Teori Etis, Teori Utilitas, dan Teori Legalistik.

Teori Etis memandang bahwa tujuan hukum yang primer ialah semata-mata buat mewujudkan keadilan (justice).<sup>27</sup> Teori Utilitas pula memandang bahwa tujuan hukum yang primer artinya semata-mata buat mewujudkan kemanfaatan (utility), serta Teori Legalistik menegaskan bahwa tujuan hukum yang utama ialah semata-mata buat mewujudkan kepastian aturan (sah certainty).<sup>28</sup> Teori terkini yang di dalamnya meliputi 2 teori yakni Teori Prioritas standar serta Teori Prioritas Kasuitik. Teori Prioritas baku menentukan bahwa tujuan hukum yg fundamental mencakup tiga tujuan yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 216-217

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 213

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

hukum.<sup>29</sup> Sedangkan Teori Prioritas Kasuitik memandang bahwa tujuan hukum pada prinsipnya sama dengan teori prioritas baku yakni meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta urutan prioritas tujuan hukum tadi sesuai menggunakan masalah yang dihadapi serta ingin dipecahkan.<sup>30</sup> Tujuan hukumnya sama dengan Teori Prioritas standar, namun Teori tak berhierarki. Keadilan bisa lebih diutamakan dari Kemanfaatan dan Kepastian sesuai dengan kasus yang dihadapi. dengan demikian pada praktik penyelesaian dilema hukum aparaturnya dapat mengedepankan keadilan, kemanfaatan, serta/atau kepastian atau sebaliknya yg dilakukan secara proporsional.

Selaras menggunakan tujuan hukum barat, Indonesia menggunakan hukum formal barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, serta kepastian aturan, namun Indonesia pula menganut sistem eropa kontinental secara umum dikuasai pada sistem hukumnya, sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu ditimbulkan oleh keadaan serta sejarah perkembangan Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali.

Soebekti, beropini bahwa aturan itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran serta kebahagiaan para rakyat. dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.<sup>31</sup>

Teori campuran, Mochtar Kusumatadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama berasal aturan artinya ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ialah syarat pokok bagi adanya warga manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain aturan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, Hal. 81

merupakan tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya dari masyarakat dan zamanya.<sup>32</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memakai konsep awam tujuan hukum yg sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* serta *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. tetapi yang lebih secara umum dikuasai bercorak legalistik yg menekankan pada aspek aturan tertulis yg berorientasi di kepastian.

## **B.2. Tujuan Hukum dalam Aspek Keadilan**

Teori tujuan hukum pada dasarnya lahir berdasarkan aliran hukum yang melatar belakangnya. Sehingga setiap aliran hukum memiliki para ahli hukumnya masing-masing, termasuk dalam hal ini para ahli hukum yang mengemukakan teori tujuan dalam aspek keadilan maupun kemanfaatan. Selaras dengan yang telah dikemukakan pada Ahmad Ali menjadi Teori Klasik pada bagian sebelumnya, yang dimana dalam perkembangan ilmu aturan dikenal 3 jenis aliran konvensional wacana tujuan aturan yakni aliran etis, peredaran utilitas dan sirkulasi yuridis formal.

Keadilan dari berasal suku kata “adil” yang pada Kamus besar Bahasa Inonesia diartikan: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.<sup>33</sup> sehingga keadilan secara terminologi lebih menekan pada suatu perbuatan atau tindakan yang sama rata dan tidak memihak.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di muat dalam <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 03 Maret 2020

Berdasarkan aliran Etis bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu semata-mata buat mencapai keadilan. Teori etis menekankan pada tujuan hukum yang bernuansa moral-etis baik bagi individu maupun warga secara keseluruhan. di teori inilah keadilan dititikberatkan menjadi tujuan aturan. Hal ini dikarenakan isi hukum diklaim ditentukan sang keyakinan etis terhadap apa yg adil (justice) serta yg tidak adil (unjustice).<sup>34</sup>

galat satu penganut sirkulasi Etis adalah Aristoteles yg membedakan keadilan pada 2 jenis yakni: (a). keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan pada setiap orang jatah dari jasanya. artinya keadilan ini menuntut supaya setiap orang menerima bagian yang sama banyaknya berdasarkan jasa serta atau prestasi seseorang. (b). keadilan komunikatif, yakni keadilan yang menyampaikan pada setiap orang yg sama banyaknya, tanpa melihat atau mengingat jasa serta/atau prestasi seorang.<sup>35</sup>

Pandangan mengenai keadilan sebagai tujuan aturan berkembang menjadi suatu yang pesat dan yg cukup populer keliru satunya John Rawls. ia berpendapat bahwa perlu terdapat keseimbangan diantara kepentingan eksklusif dan kepentingan beserta, dimana ukuran asal ekuilibrium tadi adalah keadilan.<sup>36</sup> hukum itu ada supaya tak terjadi benturan kepentingan eksklusif dan kepentingan

---

<sup>34</sup> Sabatika Sinung Wibawanti, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum*, Hal. 3

<sup>35</sup> H. Sarwohadi, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Demokrasi*, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hal. 3, yang dimuat dalam <http://www.pta-bengkulu.go.id/images/artikel/teori20hukum.pdf> diakses pada 03 Maret 2020

<sup>36</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta. Hal. 161

beserta itu, sebagai akibatnya aturan baru akan ditaati apabila ia bisa meletakkan prinsip-prinsip keadilan<sup>37</sup>

berdasarkan banyak sekali pandangan diatas, dapat ditarik konklusi bahwa keadilan harus menjadi titik keseimbangan pada penerapan hukum yg dimana kepentingan pribadi serta kepentingan bersama wajib bisa dievaluasi secara proporsional.

### **B.3. Tujuan Hukum dalam Aspek Kemanfaatan**

Secara ideal, bila mengacu pada pemikirannya Gustav, hukum harusnya dapat mengakomodir baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Akan tetapi kenyataan praktik hukum lebih condong pada satu tujuan dan mengesampingkan tujuan yang lain. Dalam artikelnya Sabatika Sinung yang berjudul "*Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum*". Ia membedakan sudut pandang tujuan hukum yakni: (1) sudut pandang filsafat hukum yang lebih menekankan kepada keadilan (*gerechtigheit*); (2) sudut pandang sosiologi hukum yang lebih menekankan kepada kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); (3) sudut pandang positif normatif yang lebih menekankan kepada kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);<sup>38</sup>

Pandangan tentang kemanfaatan pada awalnya muncul dan berangkat dari pemikiran utilitarianisme yang salah satu tokoh besarnya adalah Jeremy Bentham. Berdasarkan Teori Utilitas bahwa tujuan hukum wajib memberikan kebahagiaan yang sebanyak-besarnya (the greatest happiness the greatest number) bagi setiap

---

<sup>37</sup> Ibid. Hal. 162

<sup>38</sup> Sabatika Sinung Wibawanti, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum*, Hal. 1



orang. Teori inilah yg dianut sang aliran utilitarianisme yang menitikberatkan pada kemanfaatan menjadi tujuan aturan.<sup>39</sup>

Kemanfaatan menjadi salah satu penilaian sosial dalam penerapan hukum oleh aparaturnegara. Suatu aturan yang baik tentu akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat, bila sebaliknya. Maka ia tidak mencerminkan nilai-nilai tujuan yang ada.

#### **B.4. Tujuan Hukum dalam Aspek Kepastian Hukum**

Kepastian aturan artinya teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme aturan yg berkembang di abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan aturan positif yakni suatu hukum yg berlaku pada suatu daerah Negara dan atau kedaan tertentu yg berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). hukum tadi pada prinsipnya mengatur atau berisi perihal ketentuan-ketentuan awam yg menjadi pedoman bertingkah laris bagi setiap individu rakyat.

Bahwa adanya aturan hukum semacam itu serta pelaksanaan hukum tadi akan mengakibatkan kepastian aturan, yg pada pandangan Peter Mahmud menjadi berikut:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat awam membentuk individu bisa mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; serta kedua, berupa keamanan hukum bagi individu berasal kesewenangan pemerintah karena menggunakan adanya aturan yang bersifat awam itu individu bisa mengetahui apa saja yg boleh dibebankan atau dilakukan sang negara terhadap individu.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Prisca Oktaviani Samosir, “*Tujuan dan Fungsi Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*”, Jurnal Ilmiah Universitas Lampung. Hal. 20

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Hal 136

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai aturan substantif dan aturan prosedural yg dimuntahkan sang Produsen hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi ihwal perbuatan apa saja yg boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural artinya peraturan yg isinya mengatur perihal adat dan tata tertib buat melaksanakan peraturan substantif tadi yg bersifat prosedural.<sup>41</sup>

Kepastian undang-undang lahir berasal peredaran yuridis dogmatik-normatif yang bersumber berasal pemikiran kaum sah positivisme pada global hukum. penganut sirkulasi ini, tujuan hukum hanya semata-mata buat mewujudkan sah certainty (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian aturan sifanya hanya sekedar membentuk produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar memakai “kacamata kuda” yang sempit.<sup>42</sup>

Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan aturan terasa tidak adil, serta tidak memberikan manfaat yang akbar bagi secara umum dikuasai warga rakyat, hal itu tak menjadi soal, asalkan kepastian aturan sah certainty bisa terwujud.<sup>43</sup>

Redbruch, pada tesisnya yang membicarakan perihal cita aturan (idea des recht) yang termaktub dalam tiga nilai dasar (Grundwerten) yaitu keadilan (gerechtigkeits), kemanfaatan (zweckmaessigkeit), serta kepastian aturan

---

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, Hal. 77

<sup>42</sup> Acmad Ali, *Op.cit.* Hal.284

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal.286

(rechtssichherkeit).<sup>44</sup> Ketiga nilai dasar tersebut tak selalu berada pada korelasi yg harmonis (serasi) satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan satu sama lain.

sesuai ajaran prioritas standar, Gustav Rebruch mengemukakan pulang, yg awalnya bahwa inspirasi dasar aturan itu adalah tujuan aturan secara bersama-sama, tetapi setelah berkembang, bahwa (dia mengajarkan) kita harus memakai asas prioritas, dimana prioritas pertama ialah keadilan, ke 2 kemanfaatan, serta terakhir ialah kepastian hukum. kepastian dan kemanfaatan aturan tidak boleh bertentangan menggunakan keadilan, jua kepastina hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.<sup>45</sup>

Jan Micheil Otto menyampaikan suatu definisi “kepastian aturan” yg tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian aturan nyata sesungguhnya meliputi pengertian kepastian aturan yuridis, namun sekaligus lebih berasal itu. saya (Jan) mendefinisikannya menjadi kemungkinan bahwa pada situasi eksklusif:<sup>46</sup>

1. tersedia aturan-aturan aturan yg kentara, konsisten dan simpel diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui sebab (kekuasaan) negara.
2. bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan aturan itu secara konsisten serta pula tunduk serta taat terhadapnya.
3. bahwa di prinsipnya bagian terbesar atau lebih banyak didominasi dari rakyat-negara menyetujui muatan isi dan sebab itu menyesuaikan sikap mereka terhadap hukum-hukum tersebut.

---

<sup>44</sup> Redbruch, dalam Acmad Ali, *Ibid.* Hal.292

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal. 288

<sup>46</sup> Jan Michiel Otto, *ibid.* Hal. 122

4. bahwa hakim-hakim (peradilan) yg mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tadi secara konsisten sewaktu mereka merampungkan konkurensi aturan yg dibawa dihadapan mereka.
5. bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Demikian, intinya kepastian aturan akan menyampaikan suatu dasar, apa yg boleh dan tidak boleh diperbuat sang warga, pejabat negara dan proteksi bagi setiap individu masyarakat berasal tindakan otoriter negara. tetapi yg tidak kalah krusial adalah bahwa nilai kepastian aturan tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya hubungan antara hukum aturan yg satu menggunakan praktik hukum oleh aparatur aturan mirip hakim, jaksa dalam memberikan suatu putusan. Suatu hukum yg satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan saling bertentangan, begitupula dalam mempraktiknya setiap aparatur aturan wajib tunduk kepadanya sebagai akibatnya bisa menimbulkan suatu kepastian aturan dalam implementasinya. Termasuk pada hal ini bagi hakim pada membuat suatu putusan hakim.